



Analisis laporan realisasi anggaran sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan pada kantor inspektorat pembantu wilayah kerja Jakarta Barat

Gurhanawan

Universitas Bina Sarana Informatika

gurhanawan.ghn@bsi.ac.id

Info Artikel :

Diterima :
5 November 2023
Disetujui :
12 Desember 2023
Dipublikasikan :
28 Desember 2023

ABSTRAK

Laporan Realisasi Anggaran merupakan bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan realisasi anggaran inspektorat secara berturut-turut dari tahun 2020 – 2022 dengan melihat kepada tiga aspek, yaitu varian belanja, tingkat ekonomi dan rasio efisiensi belanja. Penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif kuantitatif, yang mana data yang dikumpulkan disusun, dianalisis dan menginterpretasikan dengan cara mendeskripsikan hasil yang diperoleh. Hasil analisis menunjukkan kinerja keuangan Inspektorat Pembantu wilayah Kerja Jakarta Barat mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Inspektorat Pembantu wilayah Kerja Jakarta Barat dapat dikatakan sudah baik.

Kata kunci: Varian belanja, Ekonomi, Efisiensi, Anggaran

ABSTRACT

Budget Realization Report is a form of financial report issued by the government or agency before making a balance sheet report and cash flow report. The purpose of this study is to analyze the inspectorate's budget realization report consecutively from 2020 - 2022 by looking at three aspects, namely spending variants, economic levels and spending efficiency ratios. This study uses a quantitative descriptive method, in which the data collected is compiled, analyzed and interpreted by describing the results obtained. The results of the analysis show that the financial performance of the Assistant Inspectorate for the West Jakarta Working Area has increased significantly. So it can be concluded that the financial performance of the Assistant Inspectorate for the West Jakarta Working Area can be said to be good.

Keywords: Variant shopping, Economy, Efficiency, Budget



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/komersial. Secara kelembagaan, wilayah publik meliputi organisasi nonlaba pemerintah dan organisasi nonlaba non pemerintah. Bastian (2019) mengemukakan beberapa jenis organisasi sektor publik di Indonesia, yaitu organisasi pemerintah pusat, organisasi pemerintah daerah, organisasi partai politik, organisasi LSM, organisasi yayasan, organisasi pendidikan seperti sekolah, organisasi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, dan organisasi tempat peribadatan seperti masjid, wihara dan pura.

Dalam rangka menjalankan organisasi sektor publik, dana yang digunakan bersumber dari masyarakat umum dan tentunya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Pada sektor pemerintahan, dana yang dipakai bersumber dari pajak, retribusi, laba BUMN/BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang sah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, karena tujuannya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaatnya bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, maka diawal tahun atau sebelum memasuki tahun baru pemerintah menyusun rancangan anggaran, untuk pemerintah pusat disebut Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (RAPBN) dan untuk pemerintah daerah

disebut Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (RAPBD) dan selanjutnya diserahkan kepada DPR/DPRD sebagai wakil rakyat dan selanjutnya DPR/DPRD akan memberikan tanggapan dan masukan dan terakhir akan membuat sebuah keputusan yang berbentuk Undang-Undang atau PERDA berupa APBN dan APBD.

APBN dan APBD yang telah disahkan oleh lembaga legislatif merupakan pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan, dan diakhir tahun pemerintah dituntut untuk memberikan laporan realisasi dari anggaran yang telah diajukan. Dalam istilah lain dikenal juga dengan laporan realisasi belanja, yaitu jumlah anggaran belanja yang telah dibayarkan atau dipertanggungjawabkan oleh SKPD, yang angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (Abdullah & Nazry, 2015).

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 UU Republik Indonesia no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi sebagai berikut: (1) Menteri Keuangan/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/ Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan aset, utang dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. (2) Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. (Muindro Renyowijoyo, 2013 :25)

Bentuk laporan pertanggung jawaban oleh pemerintah terhadap anggaran yang telah disusun harus merujuk kepada standar akuntansi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Menteri keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 59/PMK.06.2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Mengenai sistem akuntansi yang dipakai oleh pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan menteri keuangan, dan secara spesifik diatur oleh peraturan gubernur/bupati/walikota, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 pasal 6 ayat 3 & 4 yang berbunyi: (1) Sistem akuntansi pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintah; (2) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (PP no 71/2010).

Sistem akuntansi yang dipakai dalam hal laporan keuangan oleh pemerintah dikenal dengan akuntansi sektor publik. Menurut Indra Bastian, akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga - lembaga tinggi negara dan departemen - departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat dan yayasan sosial maupun pada proyek - proyek kerjasama sektor publik (Bastian, 2019).

Diantara bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan oleh sektor publik adalah laporan realisasi anggaran. Menurut Mahsun (2015), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pendapatan dinilai tidak baik apabila realisasinya lebih besar daripada anggarannya, karena anggaran pendapatan merupakan batas minimal yang harus diperoleh. Sebaliknya kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya tidak melampaui terget anggarannya, sebab anggaran belanja merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan (Mahmudi, 2016).

Tujuan dari laporan realisasi anggaran adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pemakaian anggaran yang telah ditetapkan, dan informasi tersebut akan dipergunakan oleh publik atau pihak pemangku kepentingan. Tapi tidak semua pembaca laporan bisa untuk membaca dan memahami laporan tersebut walupun laporan keuangan bersifat *general purposive* artinya dibuat lebih umum dan sederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak.

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan dan menafsirkan angka - angka yang terdapat dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, sehingga analisis laporan keuangan merupakan seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan (Fitra, 2019).

Disamping berguna untuk mengambil keputusan bagi pihak yang berkepentingan, analisis laporan keuangan juga sebagai gambaran terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dari laporan keuangan atau laporan realisasi anggaran yang dikeluarkan, publik akan melihat tingkat keberhasilan dan pencapaian dari program kerja yang telah disusun sebelumnya. Menurut Ronald dan Sarmiyatiningsih dalam Nasution (2018) menyebutkan “kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur”.

Dalam tulisan ini, satu dari organisasi sektor publik yang ingin penulis teliti adalah inspektorat pembantu daerah kerja Jakarta barat. Kota Jakarta Barat merupakan kota administrasi DKI Jakarta, dimana dalam penetapan anggaran mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan di DKI Jakarta, bukan mempunyai APBD sendiri seperti kota-kota lain di Indonesia. Fungsi inspektorat adalah membantu pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur no 252 tahun 2016 pasal 24 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: (1) Di setiap Kota / Kabupaten administrasi dibentuk Inspektorat pembantu wilayah yang merupakan unit kerja inspektorat. (2) Inspektorat pembantu daerah dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur dan secara operasional berkoordinasi dengan Walikota / Bupati. (Pergub no 252/2016)

Berhubung inspektorat merupakan bagian dari sektor publik maka inspektorat pun dituntut untuk menyampaikan laporan keuangan, terhadap anggaran yang telah diberikan untuk belanja operasi di wilayahnya (Mahanani, 2018). Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis varian belanja, tingkat ekonomi, rasio efesiensi belanja yang diliaht dari laporan realisasi anggaran dengan judul Analisis Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Penilaian Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kantor Inspektorat Pembantu Wilayah Kerja Jakarta Barat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektif dan efesiensi anggaran yang telah dikeluarkan oleh inspektorat pembantu wilayah kerja jakarta barat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terhadap laporan keuangan pemerintah dan tentunya akan meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan, disusun, dianalisis dan menginterpretasikan dengan cara mendeskripsikan hasil yang diperoleh yang bisa memberikan keterangan yang lengkap terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2017) deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Kuncoro dalam Soda et al., (2021) data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Kuncoro dalam Soda et al., (2021) data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data tersebut merupakan dokumentasi dari ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Pembantu Wilayah Kerja Jakarta Barat dari tahun 2020 – 2022. Data penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) tahun 2020 – 2022

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui media perantara secara tidak langsung, seperti buku, catatan atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan sesuai data yang dibutuhkan kemudian diolah oleh penulis.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan konsep organusasi sektor publik yang berdasar kepada 3 elemen utama, yaitu:

1. Analisis varian belanja

Analisis anggaran merupakan selisih atau perbedaan antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti (Mahmudi dalam Rahayu, 2017). Ketentuan dalam belanja daerah adalah bahwa anggaran merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah, sehingga kinerja pemerintah daerah dianggap baik jika belanja tidak melebihi dari anggaran

2. Tingkat ekonomi:

$$\text{Tingkat Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\% \quad (1)$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri no 690.900-327, tentang kriteria tingkat efektivitas penerimaan PAD sebagai berikut:

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak ekonomis
- Jika hasil pencapaian antara 90 – 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang ekonomis
- Jika hasil pencapaian antara 80 – 90% maka belanja anggaran dikatan cukup ekonomis
- Jika hasil pencapaian anatar 60 – 80%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat ekonomis (KPermendagri dalam M. I. Nasution, 2021)

3. Rasio efisiensi belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \quad (2)$$

Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak absolute tapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Lontaan & Pangerapan, 2016).

HASIL PENELITIAN

Inspektorat Pembantu Wilayah Jakarta Barat

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. Dalam menjalankan tugasnya, sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no 252 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Daerah, Pengelolaan BUMD, Pencegahan dan Investigasi.

Untuk menjalankan fungsi inspektorat, pada setiap Kota / Kabupaten administrasi dibentuk Inspektorat Pembantu Wilayah yang merupakan Unit Kerja Inspektorat. Inspektorat Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur dan secara Operasional berkoordinasi dengan Walikota / Bupati.

^Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka pemerintah daerah menganggarkan anggaran biaya operasi untuk inspektorat, dalam hal ini inspektorat pembantu wilayah Jakarta Barat. Setelah anggaran itu dibelanjakan, sesuai dengan amanat Undang – Undang mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, maka inspektorat pembantu wilayah jakarta barat setiap tahun membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Opearsional, dan Laporan Perumahan Ekuitas.

Dalam lampiran Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no 62/2021 poin F tentang penyajian laporan keuangan angka 3 menyebutkan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh inspektorat dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu peride anggaran.

Hasil

Objek penelitian ini dikhususkan mengenai laporan realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah Kerja Jakarta Barat dari tahu 2019 – 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang sudah diolah oleh peneliti. Dimana dari data yang didapatkan, peneliti menganalisis data tersebut yang fokusnya kepada tiga aspek yaitu analisis varian belanja, tingkat ekonomis dan rasio efesiensi belanja.

1. Analisis Varian Belanja

Dalam ketentuannya, bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimal yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah akan dinilai baik kinerjanya apabila pengeluarannya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Analisis varian merupakan bentuk analisis yang sederhana, yaitu dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran. Walaupun sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti (Mahmudi dalam Liando & Elim,

2016). Untuk mengetahui analisis varian belanja, maka kita akan lihat laporan realisasi anggaran sebagai berikut.

Tabel 1. Laporan realisasi anggaran inspektorat wilayah kerja Jakbar 2020 - 2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Bertambah/ Berkurang	(%)
2020	717.265.519,00	702.178.695, 00	15.086.824	97,96 %
2021	874.756.221,00	857.827.950,00	16.928.271	98,06 %
2022	1.702.345.837,00	1.076.385.252,00	625.960.585	63,22 %

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana terlihat pada tabel 1, maka Inspektorat Pembantu wilayah Jakarta Barat dari tahun 2020 s/d 2022 terdapat selisih anggaran positif. Hal ini mengidentifikasi adanya penghematan terhadap pengeluaran anggaran. Pada tahun 2020, anggaran belanja terserap 97,96%, dengan penghematan anggaran belanja sebesar Rp 15.086.824 dari total anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, anggaran belanja terserap sebesar 98,06%, dengan penghematan anggaran belanja sebesar Rp 16.928.271 dari anggaran yang ditetapkan. Dan pada tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah penghematan, dimana anggaran yang ditetapkan Rp 1.702.345.837, pengeluaran sebesar Rp 1.076.385.252, dengan sisa anggaran sebesar Rp 625.960.585 dengan persentase sebesar 63,22%. Dari hasil perhitungan analisis varian belanja, menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Pembantu wilayah Jakarta Barat dinilai baik dan punya peningkatan karena bisa melakukan penghematan anggaran belanja.

2. Tingkat Ekonomi

Pengukuran ekonomis atau kehematan terhadap tingkat biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kegiatan atau memperoleh sesuatu. Mengukur tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi pengeluaran dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk mencari hasil dari tingkat ekonomis ini, maka anggaran yang telah dikeluarkan (realisasi anggaran) dibagi dengan anggaran yang ditetapkan dan selanjutnya dikali 100%, sebagaimana bentuk rumusnya telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah Kerja Jakarta Barat tahun 2019 – 2022 ditemukan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Tingkat ekonomis berdasarkan LRA inspektorat wilayah Jakbar 2020 - 2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Ekonomi	Kriteria
2020	717.265.519,00	702.178.695, 00	97,96 %	Kurang Ekonomis
2021	874.756.221,00	857.827.950,00	98,06 %	Kurang Ekonomis
2022	1.702.345.837,00	1.076.385.252,00	63,22 %	Ekonomis

Berdasarkan analisis Realisasi Laporan Anggaran yang terdapat pada tabel diatas, menggambarkan bahwa anggaran lebih besar dari realisasinya, hal ini adalah baik.

Selama periode dari tahun 2020 s/d 2022 menunjuk tingkat ekonomi belanja yang dilakukan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah Jakarta Barat bervariasi, dan kriteria yang berbeda. Dimana hasil persentase dari rasio diatas diketahui bahwa anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp 717.265.519, dari anggaran itu maka inspektorat menggunakannya sebesar Rp 702.178.695, maka hasil persentase tingkat ekonominya sebesar 97,96%, hal ini dinilai kurang ekonomis. Pada tahun 2021, Pemerintah DKI Jakarta menetapkan anggaran untuk Inspektorat Pembantu Wilayah Kerja Jakarta Barat sebesar Rp 874.756.221, dan pengeluaran sebesar Rp 857.827.950, setelah dicari nilai ekonomisnya, maka persentasenya sebesar 98,06 % dengan kriteria masih di posisi kurang ekonomis. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat penurunan persentase, dimana anggaran untuk Inspektorat Pembantu Wilayah Jakarta Barat sebesar Rp 1.702.345.837 dan pengeluaran sebesar 1.076.385.252, setelah dicari perbandingan, maka hasil yang diperoleh sebesar 63,22 %. Dari hasil yang didapatkan pada tahun 2022, maka kriterianya adalah ekonomis. Semakin kecil rasio ekonomi, maka kinerja keuangan semakin baik.

Berdasarkan perhitungan ekonomi pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kerja Jakarta Barat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 s/d 2022, setelah dilakukan perhitungan rasio

ekonomi menunjukkan bahwa tahun 2020 dan 2021 kurang mengekonomiskan pemakaian anggaran yang ditargetkan, dengan tingkat ekonomis hampir mendekati 100%.

Rata – rata tingkat ekonomi tahun 2020 dan 2021 berada di posisi 90 – 100%, yaitu dengan kriteria kurang ekonomis. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengekonomiskan perbelanjaan masih kurang. Lain halnya dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022, dimana terdapat peningkatan yang signifikan, dimana pada dua tahun sebelumnya, kriteria ekonomi berada di posisi kurang ekonomis, sementara pada tahun 2022 posisi ekonomisnya berada di ekonomis. Ini membuktikan usaha dan kinerja yang bagus dan luar biasa, Inspektorat Pembantu Wilayah Kerja Jakarta Barat telah meningkat kinerja keuangannya, dengan memperhatikan hal – hal yang dibutuhkan dalam pengeluaran anggaran, sehingga pada tahun 2022 kriteria ekonomis.

3. Rasio Efisiensi Belanja

Efisiensi menurut Nordiawan & Ayuningtyas dalam (Putra & Anitasari, 2019) mengidentifikasi efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumberdaya (input) yang digunakan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah – rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar – besarnya.

Rasio efisiensi belanja adalah perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Tujuan rasio efisiensi belanja ini adalah untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang akan dihasilkan dari rasio efisiensi ini berbentuk *relatif*, bukan *absolute*, artinya tidak ada standar baku untuk penilaian baik atau tidaknya dalam rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi dalam Sugiharti & Jumaroh, 2021).

Berikut bentuk dari analisis rasio efisiensi belanja Inspektorat Pembantu Wilayah Jakarta Barat.

Tabel 3. Rasio efisiensi belanja inspektorat pembantu wilayah Jakbar 2020 – 2022

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)	Naik/(Turun) (%)
2020	717.265.519,00	702.178.695, 00	97,96 %	
2021	874.756.221,00	857.827.950,00	98,06 %	0.1 %
2022	1.702.345.837,00	1.076.385.252,00	63,22 %	(34.84)%

Tabel 3 diatas menggambarkan tingkat rasio efisiensi belanja Inspektorat Pembantu Wilayah Jakarta Barat dari tahun 2020 s/d 2022, dimana rasio efisiensi pada tahun 2020 sebesar 97.96%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.1%, sehingga menjadi 98.06%, sedangkan ditahun 2022 terjadi penurunan yang drastis dari 98,06% menjadi 63,22, yaitu sebesar 34,84%. Dari persentase yang dikemukakan diatas menunjukkan kinerja keuangan Inspektorat Pembantu Wilayah Jakarta Barat telah efisien, karena rasio yang didapat tidak lebih dari 100%, bahkan pada tahun 2022 tingkat efisiensinya lebih tinggi yaitu mencapai angka 63,22%. Peningkatan efisiensi ini menggambarkan kinerja keuangan pemerintah dinilai baik, bahkan terdapat peningkatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, setelah peneliti melakukan analisis terhadap laporan realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pembantu Wilayah Jakarta Barat dari 2020 s/d 2022 maka hasilnya kinerja keuangan dinilai cukup baik dan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada analisis varian belanja, pihak inspektorat bisa melakukan penghematan terhadap anggaran yang ditetapkan sehingga realisasi anggaran dibawah dari anggaran yang ditetapkan. Begitu juga dengan tingkat ekonomis, dimana pada tahun 2020 dan 2021 tercatat kriteria pengeluaran inspektorat kurang ekonomis, tetapi pada tahun 2022 inspektorat bisa menaikkan level kriteria ekonomisnya dari kurang ekonomis menjadi ekonomis, ini tentu sebuah kinerja yang baik dan usaha yang maksimal. Terakhir mengenai rasio pun terlihat kinerja keuangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Nazry, R. (2015). Analisis varian anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 272–283. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/21670>
- Bastian, I. (2019). Lingkup akuntansi sektor publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, 1–52. <https://repository.ut.ac.id/3858/1/EKSI4207-M1.pdf>
- Fitra, H. (2019). *Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah*. IRDH.
- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (Ira) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.12369>
- Lontaan, I. C., & Pangerapan, S. (2016). Analisis belanja daerah pada pemerintah kabupaten minahasa tahun anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11820>
- Mahanani, S. (2018). Kualitas pengawasan keuangan daerah di inspektorat propinsi jawa tengah. *Among Makarti*, 11(1). <https://doi.org/10.52353/ama.v11i1.162>
- Mahmudi. (2016). *Analisis lapoan keuangan pemerintah daerah*. BPFE.
- Mahsun. (2015). *Akuntansi sektor publik*. BPFE.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2018). Analisis pengaruh SDM, insentif dan sarana pendukung terhadap implementasi SAP berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 207–218. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1054570>
- Nasution, M. I. (2021). *Analisis penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan perencanaan pembangunan daerah kota medan (bappeda) kota medan periode 2016-2020*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/19099/>
- Putra, T. M., & Anitasari, M. (2019). Efisiensi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di indonesia (Data envelopment analysis). *Convergence: The Journal Of Economic Development*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i1.10859>
- Rahayu, R. P. (2017). Analisis atas laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten pamekasan. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 55–73. <https://doi.org/10.53712/jmm.v1i1.244>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32855>
- Sugiharti, R. R., & Jumaroh, J. (2021). Efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja: studi kasus di BAPPEDA Kabupaten Temanggung. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 55–68. <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i1.30>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis*. Alfabeta.